

## Pedagogi Kewarganegaraan dan Pembentukan *Civic Virtues* Mahasiswa: Praktik Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Setyo Budi Takarina<sup>1\*</sup>, Hani Subagio<sup>2</sup>, Hastangka<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan mengevaluasi model pedagogis kewarganegaraan dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi guna melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembelajaran kewarganegaraan abad ke-21. Urgensi penelitian ini berangkat dari tuntutan pengembangan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* di lingkungan perguruan tinggi sebagai fondasi pembentukan warga negara demokratis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus eksploratif yang berfokus pada praktik pembelajaran PKn pada satu kelas perkuliahan. Partisipan penelitian berjumlah 23 orang, terdiri atas 1 dosen pengampu mata kuliah PKn dan 22 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tersebut. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, kategorisasi, dan interpretasi tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum PKn di perguruan tinggi telah mengakomodasi nilai Pancasila, demokrasi, HAM, serta pluralisme, namun implementasi pedagogis masih didominasi metode ceramah dan evaluasi berbasis kognitif. Model pembelajaran partisipatif, berbasis proyek, serta *problem-based civic learning* telah mulai diterapkan, namun belum terintegrasi secara sistemik. Penelitian ini menegaskan perlunya reposisi kurikulum dengan memperkuat *experiential learning*, *interdisipliner*, literasi digital kewarganegaraan, serta kolaborasi sosial komunitas. Implikasi penelitian menawarkan rekomendasi akademik dan kebijakan untuk pengembangan kurikulum PKn yang lebih transformatif dan relevan terhadap dinamika sosial-politik kontemporer.

### **Kata kunci:**

Kewarganegaraan,  
Kurikulum,  
Pedagogi,  
Perguruan tinggi,  
Kebijakan pendidikan.

### **Histori:**

Dikirim: 27 Desember 2025  
Direvisi: 12 Maret 2026  
Diterima: 13 Maret 2026  
Online: 16 Maret 2026

©2026 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

### **Identitas Artikel:**

Takarina, S.B, Subagio, H., & Hastangka, H. (2026). Pedagogi Kewarganegaraan dan Pembentukan Civic Virtues Mahasiswa: Praktik Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Citizenship Virtues*, 6(1), 1-9.

<sup>1\*</sup>Corresponding author.

E-mail: [hanisubagio@upnyk.ac.id](mailto:hanisubagio@upnyk.ac.id)

## PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan pada level perguruan tinggi memegang peran fundamental dalam membentuk warga negara yang demokratis, kritis, dan berkeadaban (Fauzi & Srikantono, 2013). Dalam konteks perubahan sosial, politik, dan teknologi yang semakin cepat, urgensi tersebut menjadi semakin kuat karena kewarganegaraan tidak lagi dipahami sekadar sebagai status hukum, melainkan sebagai seperangkat kompetensi, nilai, dan disposisi moral yang harus dikembangkan secara sadar melalui proses pendidikan (Wahyudi et al., 2020; Waruwu et al., 2025). Perguruan tinggi sebagai ruang dialog intelektual dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga individu yang mampu berpikir reflektif, berpartisipasi publik, menghargai keberagaman, dan bertanggung jawab secara etis sebagai bagian dari komunitas nasional maupun global (Mulyana & Hidayat, 2025; Kusumawardani, 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun kompetensi kewargaan mahasiswa yang meliputi dimensi *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* (Banks, 2020). Namun berbagai studi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pendidikan kewarganegaraan dan praktik pembelajaran di kelas. Penelitian Erfiana dan Ariyanto (2020) menunjukkan bahwa pembelajaran PKN di banyak perguruan tinggi masih berorientasi pada transmisi pengetahuan normatif mengenai negara dan konstitusi (Erfiana & Ariyanto, 2020), sementara pengembangan keterampilan partisipasi demokratis belum menjadi fokus utama. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Leni (2023), yang menyatakan bahwa pendekatan pedagogis dalam pendidikan kewarganegaraan sering kali masih menekankan hafalan konsep, bukan refleksi kritis terhadap realitas sosial (Anggraeni, 2023).

Dalam konteks Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) telah lama diposisikan sebagai instrumen strategis pembangunan karakter kebangsaan, demokrasi, dan integritas sosial, yang ditegaskan melalui regulasi mata kuliah wajib nasional (Putri, 2023; Rusdiana, 2012). Namun demikian, kenyataan di banyak perguruan tinggi, menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran PKN masih cenderung bersifat transmissive, normatif, dan berorientasi hafalan. Pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan, konstitusi, dan kebangsaan sering kali disampaikan sebagai dogma, bukan sebagai ruang analisis kritis terhadap realitas sosial dan persoalan kewarganegaraan kontemporer (Anggraeni, 2023; Erfiana & Ariyanto, 2020). Pola pedagogis demikian menyebabkan kesenjangan antara tujuan ideal PKN dan pengalaman belajar mahasiswa yang diharapkan menjadi warga negara aktif, kritis, dan reflektif.

Di sisi lain, perkembangan kajian *critical citizenship education* menekankan pentingnya pembelajaran kewarganegaraan yang dialogis, reflektif, dan berbasis pengalaman sosial (Biesta, 2011). Dalam perspektif ini, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bertujuan mentransmisikan nilai-nilai nasional, tetapi juga membentuk kemampuan warga negara untuk berdialog, berargumentasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik secara kritis dan deliberatif.

Tantangan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan realitas sosial-politik Indonesia saat ini. Fenomena polarisasi politik, intoleransi, radikalisme digital (Pamungkas & Permana, 2020), misinformasi, dan menguatnya identitas

sektarian di media sosial menunjukkan bahwa partisipasi warga negara tidak selalu diarahkan pada demokrasi deliberatif yang sehat (Putri, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa pembelajaran kewarganegaraan tidak cukup hanya mengajarkan pengetahuan konstitusional, tetapi harus mengembangkan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, empati sosial, kepekaan moral, dan kemampuan berdialog lintas perbedaan (Wahyudi et al., 2020). Dengan demikian, pedagogi PKN harus menyesuaikan diri dengan perubahan lanskap kewarganegaraan yang semakin digital, global, dan multidimensional.

Di UPN Veteran Yogyakarta, kurikulum PKN sejatinya telah memuat nilai-nilai kebangsaan, Bela negara, HAM, demokrasi, dan kebhinekaan. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada cara kurikulum tersebut diterjemahkan ke dalam proses pembelajaran di kelas. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa memandang PKN sebagai mata kuliah formalitas, kurang relevan dengan kebutuhan profesional, dan kurang memberikan pengalaman kewarganegaraan yang nyata. Metode pembelajaran berbasis ceramah dan evaluasi kognitif masih mendominasi, sementara pendekatan berbasis proyek, studi kasus, dialog deliberatif, dan experiential civic learning belum menjadi praktik pedagogis utama (Fadilah & Batubara, 2024; Hidayati, 2024). Hal ini menunjukkan adanya persoalan epistemologis dan pedagogis yang memerlukan peninjauan mendalam.

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi kurikulum PKN di perguruan tinggi bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan langkah akademik penting untuk memastikan kesesuaian antara capaian pembelajaran, desain kurikulum, strategi pedagogis, asesmen, dan tuntutan kewarganegaraan abad ke-21. Evaluasi ini juga relevan dengan arah kebijakan Kampus berdampak yang menekankan pentingnya pembelajaran kontekstual, kolaboratif, interdisipliner, dan berbasis pengalaman sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih sistematis dan kritis mengenai bagaimana model pedagogis kewarganegaraan diterapkan dalam kurikulum PKN di perguruan tinggi, sejauh mana kurikulum tersebut relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat kontemporer, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya.

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama: bagaimana model pedagogis kewarganegaraan dalam kurikulum PKN di perguruan tinggi diterapkan, sejauh mana kesesuaiannya dengan kompetensi kewarganegaraan yang dibutuhkan saat ini, dan isu-isu apa saja yang muncul dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi praktik pedagogis PKN di Perguruan tinggi guna menghasilkan rekomendasi pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang lebih kritis, demokratis, humanis, dan responsif terhadap dinamika kewarganegaraan masa kini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi teoretis terhadap diskursus pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi reformasi pembelajaran di perguruan tinggi Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian yang penting, yaitu kebutuhan untuk mengkaji secara empiris bagaimana praktik pedagogi kewarganegaraan berlangsung dalam pembelajaran PKN di perguruan tinggi serta bagaimana praktik tersebut dapat dirumuskan menjadi model pedagogi kewarganegaraan yang lebih relevan dengan tuntutan demokrasi kontemporer.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif kualitatif dan interpretatif–fenomenologis. Pilihan metodologis ini berangkat dari kebutuhan penelitian untuk memahami secara mendalam pengalaman, praktik, dan konstruksi makna para dosen serta mahasiswa mengenai pedagogi kewarganegaraan dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendekatan fenomenologis memberi ruang untuk menyingkap realitas yang dialami subjek, tidak sekadar menggambarkan apa yang terjadi di kelas PKN, tetapi juga bagaimana mereka memaknainya dalam konteks kehidupan akademik dan kewarganegaraan. Studi kasus memungkinkan peneliti menelaah fenomena pedagogis secara kontekstual melalui berbagai sumber data sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kurikulum dalam praktik pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada penemuan esensi pengalaman pedagogis, bukan pengukuran atau generalisasi statistik.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi kelas, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen akademik. Observasi pembelajaran dilakukan sebanyak empat kali pertemuan perkuliahan, dengan durasi pengamatan sekitar 90 menit setiap pertemuan sesuai dengan jadwal perkuliahan. Observasi bertujuan untuk mengamati secara langsung praktik pedagogis dosen, pola interaksi kelas, metode pembelajaran, serta partisipasi mahasiswa. Selama proses observasi, peneliti menyusun catatan lapangan deskriptif dan reflektif yang merekam dinamika kelas, strategi pengajaran, serta respons mahasiswa terhadap proses pembelajaran.

Desain penelitian bersifat naturalistik, artinya peneliti hadir dan melakukan penggalian data pada setting yang wajar, tanpa manipulasi dan intervensi terhadap proses pembelajaran. Posisi peneliti menjadi instrumen utama yang mengamati, menafsirkan, dan menegosiasikan makna melalui interaksi reflektif dengan partisipan. Analisis dilakukan secara induktif, sehingga temuan tidak ditentukan sejak awal, tetapi muncul melalui proses dialogis antara data empiris dan interpretasi peneliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Pembangunan Nasional (UPN), yang dipilih karena memiliki karakteristik perguruan tinggi multikeilmuan dengan mahasiswa dari berbagai fakultas, sehingga memberikan keragaman perspektif kewarganegaraan dalam pembelajaran PKN. Subjek penelitian terdiri atas 1 dosen pengampu mata kuliah PKN dan 22 mahasiswa aktif yang telah mengikuti perkuliahan tersebut.

Prosedur penelitian berlangsung melalui beberapa tahapan yang berurutan dan saling berkaitan. Tahap pertama adalah orientasi lapangan dan penjajakan konteks, meliputi pengumpulan informasi awal mengenai struktur kurikulum, RPS, karakteristik pembelajaran PKN, serta pemetaan kemungkinan partisipan. Tahap kedua adalah pengumpulan data utama melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi pembelajaran di kelas, dan analisis dokumen akademik seperti silabus, kebijakan kurikulum, serta perangkat pembelajaran. Wawancara dilakukan secara dialogis untuk menggali pengalaman, persepsi, dan refleksi partisipan, sementara observasi ditujukan menangkap praktik pedagogis, interaksi kelas, metode pengajaran, serta dinamika diskusi kewarganegaraan. Analisis dokumen

dilakukan untuk menelusuri orientasi kurikulum dan keselarasan antara kompetensi, materi, strategi pembelajaran, dan nilai-nilai kewarganegaraan.

Tahap ketiga adalah analisis data yang dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data melalui reduksi, pengkodean, kategorisasi, dan pembentukan tema-tema utama. Teknik interpretatif-fenomenologis digunakan untuk menafsirkan makna pengalaman partisipan melalui proses reflektif hingga diperoleh pemahaman esensial mengenai pedagogi kewarganegaraan di UPN. Tahap keempat adalah verifikasi makna melalui member checking, triangulasi sumber dan metode, diskusi sejawat, serta refleksi posisi peneliti untuk menjaga kredibilitas, dan keabsahan temuan penelitian. Seluruh prosedur penelitian mengikuti prinsip etika akademik, termasuk persetujuan partisipan, kerahasiaan identitas, dan penggunaan data secara bertanggung jawab.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah open coding, yaitu mengidentifikasi unit-unit makna dari data hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Tahap kedua adalah kategorisasi, yaitu mengelompokkan kode-kode awal ke dalam kategori yang memiliki kesamaan makna. Tahap ketiga adalah pembentukan tema, yaitu menyusun tema-tema konseptual yang merepresentasikan pola utama dalam praktik pedagogi kewarganegaraan. Tahap terakhir adalah interpretasi tematik, yaitu menafsirkan temuan penelitian dengan mengaitkan data empiris dengan kerangka konseptual pendidikan kewarganegaraan dan pedagogi kritis.

Untuk menjaga kredibilitas penelitian, dilakukan beberapa prosedur validasi. Pertama, triangulasi metode dan sumber data, yaitu membandingkan temuan dari observasi kelas, wawancara partisipan, serta analisis dokumen kurikulum. Kedua, member checking, yaitu memberikan ringkasan hasil interpretasi kepada beberapa partisipan untuk memperoleh konfirmasi mengenai kesesuaian temuan dengan pengalaman mereka. Ketiga, diskusi sejawat, yaitu mendiskusikan proses analisis dan interpretasi data dengan rekan peneliti untuk mengurangi bias interpretatif. Selain itu, peneliti juga melakukan refleksi posisi (*reflexivity*) untuk menjaga transparansi proses penelitian.

Dengan model penelitian ini, pengalaman pedagogis para aktor pembelajaran tidak hanya direkam, tetapi ditafsirkan secara kritis dalam konteks sosial, kurikuler, dan institusional. Hasilnya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pendidikan kewarganegaraan hidup, dipraktikkan, dinegosiasikan, dan dimaknai dalam ruang pendidikan tinggi Indonesia, khususnya di UPN Veteran Yogyakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan empat konstruksi utama yang saling berkaitan. Temuan pertama menunjukkan bahwa kurikulum PKN di UPN Veteran Yogyakarta telah dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewargaan (Nazmi, 2025), sebagaimana tercantum dalam capaian pembelajaran yang menekankan sikap demokratis, kemampuan berpikir kritis, serta tanggung jawab sosial. Namun, berdasarkan analisis dokumen dan wawancara, terdapat jurang antara ideal kurikulum dan praksis pembelajaran. Seorang dosen menyatakan bahwa “visi kurikulumnya progresif, tetapi implementasinya belum sampai pada pemberdayaan mahasiswa.” Pernyataan ini menegaskan bahwa

kurikulum tidak otomatis menghasilkan pedagogi transformatif tanpa dukungan strategi pembelajaran yang relevan. Fenomena ini sejalan dengan Karo, (2025), yang menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sering terjebak pada rasionalisme kognitif dan belum menyentuh dimensi praksis kewargaan (Karo, 2025) Dengan demikian, persoalan utamanya bukan absennya konsep, tetapi lemahnya eksekusi pedagogis. Pembelajaran PKn di UPN Veteran Yogyakarta secara umum telah memberikan pengetahuan dasar mengenai nilai-nilai Pancasila, demokrasi, konstitusi, serta hak asasi manusia. Materi tersebut merupakan bagian dari dimensi *civic knowledge*, yaitu pemahaman warga negara mengenai sistem politik, prinsip demokrasi, dan nilai kebangsaan (Banks, 2020).

Temuan kedua memperlihatkan bahwa praktik pembelajaran masih didominasi model ekspositori, ceramah, dan penguatan materi berbasis *textbook*. Observasi kelas menunjukkan dosen menjadi pusat informasi, sementara mahasiswa lebih sering berperan sebagai penerima pengetahuan pasif. Mahasiswa mengakui bahwa pembelajaran “lebih fokus menghafal konsep daripada mengaitkannya dengan kehidupan sosial-politik aktual.”

Ketika ditanya tentang keterlibatan dalam dialog kelas, sebagian mahasiswa menyatakan tidak cukup diberi ruang untuk mengembangkan argumen atau perspektif pribadi dan cenderung mencari melalui HP untuk mendapatkan jawaban. Kondisi ini menegaskan kekhawatiran bahwa pendidikan kewarganegaraan yang bersifat transmissive hanya melahirkan kepatuhan, bukan partisipasi kritis (Banks, J.A., 2006). Secara reflektif, temuan ini menggugah pertanyaan epistemologis: apakah pembelajaran PKn telah menjadi arena demokrasi atau justru ruang reproduksi pengetahuan normatif?

Merujuk pada dimensi kedua kompetensi kewargaan adalah *civic skills*, yaitu kemampuan berpikir kritis, berargumentasi, berdialog, dan berpartisipasi dalam diskursus publik. Berdasarkan observasi kelas dan wawancara mahasiswa, keterampilan tersebut belum berkembang secara optimal karena interaksi pembelajaran masih terbatas pada penyampaian materi oleh dosen. Mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka jarang terlibat dalam kegiatan seperti debat isu publik, simulasi pengambilan keputusan politik, atau analisis kebijakan. Padahal kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan membentuk kemampuan deliberatif warga negara.

Temuan ketiga menunjukkan adanya potensi pedagogis yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dari wawancara, mahasiswa mengungkapkan pembelajaran PKn lebih cenderung pada mereproduksi pengetahuan lama atau tema lama kemudian digunakan sebagai bahan diskusi di kelas. Namun, mereka merasa isu tersebut jarang menjadi bahan diskusi formal dalam kelas. Padahal, mahasiswa mengaku lebih memahami kewarganegaraan melalui perdebatan di media sosial, kegiatan organisasi, atau pengalaman kehidupan sehari-hari. Temuan ini menguatkan gagasan Bennett (2008) bahwa kewargaan generasi muda dibentuk melalui ruang digital, bukan hanya ruang formal pendidikan (Bennett, W.L.,2008). Dengan demikian, pembelajaran PKN berpotensi kehilangan relevansi sosial apabila tidak terhubung dengan dunia kognitif, emosional, dan digital mahasiswa. Ini memperlihatkan adanya kebutuhan integrasi pedagogi kritis dan literasi digital dalam pendidikan kewarganegaraan.

Temuan keempat menunjukkan adanya inisiatif pedagogis inovatif, tetapi masih bersifat individual dan belum terstruktur pada tingkat institusional. Beberapa dosen

menerapkan diskusi kasus, *problem-based learning*, simulasi parlemen, analisis berita, hingga proyek advokasi sosial kecil. Praktik ini terbukti meningkatkan partisipasi mahasiswa dan mendorong refleksi moral. Seorang mahasiswa menyatakan bahwa “baru saat dosen memberikan studi kasus, kami merasa PKN itu dekat dengan hidup kami.” Pendekatan tersebut selaras dengan paradigma *critical citizenship education* yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek kewargaan yang berdaya, sadar, reflektif, dan berorientasi tindakan.

Dimensi ketiga kompetensi kewargaan adalah *civic dispositions*, yaitu sikap dan nilai yang mendukung kehidupan demokratis seperti toleransi, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap keberagaman. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa sebenarnya memiliki minat tinggi terhadap isu sosial dan politik, terutama yang berkembang di media digital. Namun ruang pembelajaran formal belum sepenuhnya memfasilitasi refleksi kritis terhadap pengalaman kewargaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan disposisi kewargaan lebih banyak berkembang melalui pengalaman sosial mahasiswa di luar kelas, bukan melalui desain pedagogis yang terstruktur dalam pembelajaran PKN.

Namun, inovasi ini belum memiliki dukungan kelembagaan berupa pelatihan pedagogi, kebijakan, atau forum berbagi praktik baik, sehingga keberlanjutannya bergantung pada komitmen personal dosen. Secara kritis, keempat temuan memperlihatkan bahwa isu pedagogi kewarganegaraan di perguruan tinggi bukan hanya persoalan metode mengajar, tetapi persoalan paradigma pendidikan. Orientasi pembelajaran yang masih menempatkan mahasiswa sebagai objek pengetahuan menghambat pembentukan identitas kewargaan yang reflektif dan partisipatif. Dalam perspektif Biesta (2011), tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan individu cerdas, tetapi warga demokratis yang mampu hidup bersama secara etis dan politis (Biesta, 2011). Oleh karena itu, revitalisasi pedagogis diperlukan agar PKN tidak hanya menjadi mata kuliah wajib, tetapi ruang deliberasi publik akademik.

Secara reflektif, penelitian ini menunjukkan bahwa UPN Veteran Yogyakarta memiliki modal institusional, kultur akademik, dan karakter mahasiswa yang memungkinkan transformasi pedagogi kewarganegaraan menuju model dialogis, kritis, dan transformatif (Fazira et al., 2024). Namun perubahan tersebut membutuhkan komitmen sistemik revisi desain kurikulum, peningkatan kapasitas pedagogis dosen, integrasi isu-isu aktual, penggunaan teknologi digital, serta sistem evaluasi yang menghargai proses refleksi, argumentasi, dan tindakan sosial. Dengan demikian, PKN dapat berperan strategis dalam menyiapkan generasi warga negara yang adaptif terhadap tantangan demokrasi abad ke-21.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pedagogi kewarganegaraan dalam pembelajaran PKN di Perguruan tinggi masih menghadapi ketidaksinkronan antara orientasi kurikulum yang menekankan pembentukan warga negara kritis dan praktik pembelajaran yang masih didominasi pendekatan transmisi. Meskipun capaian pembelajaran telah mencakup dimensi kognitif, afektif, dan praksis kewargaan, implementasinya belum sepenuhnya memberikan ruang dialog, refleksi, serta pengalaman belajar yang mendorong partisipasi kewargaan yang aktif dan reflektif. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya potensi

transformasi pedagogis melalui inisiatif inovatif beberapa dosen, minat kritis mahasiswa terhadap isu-isu kebangsaan kontemporer, serta dukungan lingkungan akademik yang multikeilmuan. Potensi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pedagogi kewarganegaraan yang lebih dialogis, kontekstual, dan partisipatif memungkinkan untuk dikembangkan dalam pembelajaran PKN di perguruan tinggi. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa temuan penelitian ini bersifat kontekstual dan terbatas pada kasus pembelajaran PKN pada satu kelas di UPN Veteran Yogyakarta. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mewakili praktik pedagogi PKN di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, melainkan memberikan gambaran empiris yang dapat menjadi bahan refleksi dan pijakan awal bagi penelitian lebih lanjut mengenai inovasi pedagogi kewarganegaraan di pendidikan tinggi. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan desain kurikulum, peningkatan kapasitas pedagogis dosen, integrasi isu-isu kewarganegaraan aktual dan digital, serta pengembangan model pembelajaran berbasis pengalaman sosial dan dialog deliberatif. Dengan langkah tersebut, pembelajaran PKN di perguruan tinggi dapat menjadi ruang pembentukan kewarganegaraan yang lebih reflektif, kritis, dan relevan dengan tantangan demokrasi kontemporer..

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada civitas UPN Veteran Yogyakarta, para dosen MKWK UPN Veteran Yogyakarta yang telah mendukung atas terlaksanakannya kegiatan riset atau kajian ini, serta memberikan masukan awal atas draft naskah ini.

## REFERENSI

- Anggraeni, L. (2023). *Pengantar Kewarganegaraan dan Pancasila*. In Awaluddin (Ed.), *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. CV HEI PUBLISHING INDONESIA.
- Banks, J.A. (2006). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. Wiley.
- Bennett, W.L. (2008). *Changing Citizenship in the Digital Age*. In *Civic Life Online: Learning How Digital Media Can Engage Youth*. The MIT Press.
- Biesta, G. J. J. (2011). *Learning Democracy in School and Society: Education, Lifelong Learning, and the Politics of Citizenship*. Sense Publishers.
- Erfiana, M.A.N.E., & Ariyanto, A. (2020). Restrukturisasi pendidikan kewarganegaraan sebagai langkah menghadapi era disrupsi. *AL-ASASIYYA: Journal Basic of Education*, 5(1), 79–95.
- Fadilah, A.N., & Batubara, A. (2024). Penguatan citizenship transmission pada Pembelajaran PPKn untuk Menghadapi Tantangan Krisis Identitas Nasional pada generasi z di MTSS Islamiyah sei kamah ii. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2).

- Fauzi, I., & Srikantono. (2013). *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Civil Education)*. SUPERIOR “Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial.
- Fazira, A., Budimansyah, D., & Mahpudz, A. (2024). Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Society 5.0: Menerapkan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. *Didaktika: Jurnal Kependidikan* , 13(001).
- Hidayati, N.N. (2024). *Pengertian dan Prinsip Dasar Metode Pembelajaran*. Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah (Penerbit HN Publishing) .
- Karo, S.M. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan di Tengah Krisis Moral Digital: Tawaran Konseptual Pendidikan Nilai Era Post Truth. *Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic*, 11(2), 32–42.
- Kusumawardani, S.S. (2024). *Buku Ajar Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Pendidikan Kewarganegaraan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Nazmi, R. (2025). *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan* . In Ida Kumala Sari (Ed.), *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Kewarganegaraan yang Berbasis Hukum dan Demokrasi)*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pamungkas, C., & Permana, Y.S. (2020). *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia* (Cahyo Pamungkas dan Yogi Setya Permana, Ed.). Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Putri, M.F.J.L. (2023). *Hakikat Negara, Warga Negara dan Kewarganegaraan* . In Oki Anggara (Ed.), *Kewarganegaraan: Teoretis dan Praksis*. Future Science Publisher.
- Putri, R.A. (2025). Demokrasi dalam Krisis Partisipasi: Perluakah Membangun Pendidikan Kebijakan Publik dan Hukum untuk Generasi Muda? *Jurnal Ilmu Administrasi Negara(AsIAN)*, 13(1).
- Rohmat Mulyana, R., & Hidayat, R. (2025). *Pendidikan Karakter pada Perguruan Tinggi*. Penerbit Undhar Press.
- Rusdiana. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Pustaka TRESNA BHAKTI .
- Wahyudi, A., Setiawan, D., & Jamaludin. (2020). *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Perspektif Moral Dan Karakter*. AA. RIZKY.
- Waruwu, I.F.S.I., Waruwu, F.S.P., Telaumbanua, D.T & Harefa, H.O.N. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Nilai–Nilai Kebangsaan pada Generasi Muda di Era Globalisasi. *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 02(02).